

# RESPON TIONGKOK TERHADAP ANCAMAN KEAMANAN MARITIM SEBAGAI DAMPAK DARI PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR JEPANG KE SAMUDRA PASIFIK

Siti Fitri Auliaun Nufus<sup>1</sup>, Khairur Rizki<sup>1</sup>, Kurnia Zulhandayani Rizki<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

[Liliyanufus1234@gmail.com](mailto:Liliyanufus1234@gmail.com)

## ABSTRACT

*This research aims to discuss China's response to maritime security threats resulting from Japan's dumping of nuclear waste into the Pacific Ocean since Thursday, August 24 2023, which is a continuation of the history of the 2011 nuclear accident. The accident still contained nuclear waste stored in a large tank. Due to limited storage space, Japan finally dumped the nuclear waste water into the Pacific Ocean after carrying out the ALPS technique which still left tritium, so Japan obtained IAEA permission. However, for China, this is a maritime threat related to cross-border maritime pollution, resulting in various Chinese responses. This research used descriptive-qualitative method.*

*The result of this research is that there is a security threat to China based on the concept of maritime security according to Christian Bueger, where the impacts experienced by China include: impact on the safety of the marine environment, impact on maritime economic development, and the impact of community concerns. Furthermore, the existing threats can be responded to by China which is explained using the foreign policy concept of James N. Rosenau and K. J. Holsti so that several Chinese responses can be found, namely: First, China's response through state actors (government), such as: economic embargo policy, strict research and monitoring policies, and diplomatic pressure. Second, China's response through non-state actors (international organizations and private companies), such as: state media public opinion, requests for scientific data to the IAEA, inviting "community shared destiny initiatives" through international organizations, as well as pressure for action from Chinese society groups, such as: public opinion on social media, demonstrations, telephone terror, and throwing buildings. All responses carried out by China were aimed at stopping maritime threats from Japan.*

**Keywords: Maritime Security Threats, Japanese Nuclear Waste Disposal, China's Response.**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai respon Tiongkok terhadap ancaman keamanan maritim sebagai dampak dari pembuangan limbah nuklir Jepang ke Samudra Pasifik sejak Kamis, 24 Agustus 2023 lanjutan sejarah kecelakaan nuklir tahun 2011. Kecelakaan tersebut masih menyimpan air limbah nuklir yang disimpan pada tanki-tanki besar. Akibat keterbatasan ruang penyimpanan, Jepang akhirnya membuang air limbah nuklir tersebut ke Samudra Pasifik setelah melakukan Teknik ALPS yang masih menyisakan zat tritium, tetapi Jepang tetap mendapatkan izin IAEA. Namun, bagi Tiongkok ini menjadi ancaman maritim terkait pencemaran laut lintas batas sehingga melakukan respon penolakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah terjadi ancaman bagi Tiongkok berdasarkan konsep keamanan maritim menurut Christian Bueger dimana dampak yang dialami oleh Tiongkok, seperti: dampak keselamatan lingkungan laut, dampak pembangunan ekonomi laut, dan dampak kekhawatiran masyarakat. Selanjutnya, ancaman yang ada dapat diberikan respon oleh Tiongkok yang dijelaskan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari James N. Rosenau dan K. J. Holsti sehingga dapat ditemukan beberapa respon Tiongkok, yaitu: Pertama, respon Tiongkok melalui aktor negara (pemerintah), seperti: kebijakan embargo ekonomi, kebijakan penelitian dan pemantauan ketat, serta tekanan diplomatik. Kedua, respon Tiongkok melalui aktor non-negara (organisasi internasional dan perusahaan media), seperti: opini publik media negara, permintaan data ilmiah kepada IAEA, mengajak "inisiatif komunitas nasib bersama" melalui organisasi internasional, serta tekanan aksi dari kelompok masyarakat Tiongkok, seperti: opini publik di

media sosial, aksi demo, teror telepon, dan pelemparan gedung. Semua respon yang dilakukan Tiongkok bertujuan menghentikan ancaman maritim dari Jepang.

**Kata Kunci: Ancaman Keamanan Maritim, Pembuangan Limbah Nuklir Jepang, Respon Tiongkok.**

## PENDAHULUAN

Keamanan maritim mencakup wilayah lautan dunia beserta seluruh aspek yang terkandung di dalamnya. Wilayah laut banyak digunakan untuk menunjang kepentingan suatu negara yang dapat dikelola dengan tepat. Hal ini membuat berbagai negara di seluruh dunia memperhatikan isu tentang keamanan maritim (Arif & Yanto, 2022). Salah satu kasus terkait permasalahan keamanan maritim berasal dari Kawasan Asia Timur, yaitu konflik antara Tiongkok dan Jepang. Kasus ini dimulai ketika Negara Jepang melakukan tindakan sepihak untuk membuang air limbah nuklir dari PLTN Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik sejak tanggal 24 Agustus 2023. Keberadaan air limbah nuklir ini merupakan imbas lanjutan dari kecelakaan nuklir akibat bencana alam gempa bumi 9 skala Richter yang disusul tsunami setinggi 12 Meter pada tahun 2011 (Mawaddah et al., 2023). Kerusakan terjadi pada inti generator nuklir PLTN Fukushima Daiichi yang menjadi lebih cepat panas ketika dioperasikan. Jepang memilih tetap mengoperasikan PLTN Fukushima dengan menjadikan air Pantai sebagai pendingin sehingga menghasilkan air terkontaminasi yang disimpan dalam tanki-tanki besar yang disediakan di lahan khusus. Namun, pada pertengahan tahun 2022, Jepang menyatakan bahwa ruang penyimpanan air terkontaminasi sudah hampir penuh, yaitu sekitar 100 tanki besar atau dengan kata lain sudah terisi sekitar 1,34 juta ton air limbah nuklir, yang dimana kapasitas ruang penyimpanan sebesar 1,37 juta ton (Barak, 2023). Setelah disimpan selama 12 tahun, Jepang akhirnya membuang air limbah nuklir tersebut ke laut setelah diolah dan disaring menggunakan Teknik ALPS (*Advanced Liquid Processing System*). Walaupun sudah melalui Teknik ALPS, ternyata kandungan zat tritium tidak dapat dihilangkan sehingga ikut terbuang mengalir ke Samudra Pasifik. Pihak IAEA (International Atomic Energy Agency) atau Badan Energi Atom Internasional sudah memberikan izin kepada Jepang untuk tindakan pembuangan tersebut karena dianggap kandungan zat tritium masih berada di bawah standar keselamatan internasional sehingga dampak bagi manusia dan lingkungan dapat diabaikan (Barak, 2023).

Namun, ternyata pada kenyataannya, setelah pembuangan dilakukan, terdapat banyak penentangan dari negara-negara lainnya. Negara-negara yang menentang tindakan Jepang banyak berasal dari negara tetangganya di Kawasan Asia Timur, terutama Negara Tiongkok. Negara Tiongkok menganggap Jepang telah melakukan tindakan egois, tidak bertanggung jawab, dan sewenang-wenang sehingga dapat mengancam keamanan maritim Tiongkok. Penentangan dan penolakan tegas yang dilakukan Tiongkok didukung dari bukti dampak yang ada. Secara umum, negara-negara Kawasan Asia Timur merasa terganggu dengan pembuangan limbah nuklir tersebut yang ditunjukkan dari adanya protes dari kelompok komunitas nelayan, pedagang di pasar ikan, dan kekhawatiran masyarakat untuk mengonsumsi makanan laut (Li, 2023). Selanjutnya, dampak yang terjadi secara khusus di Tiongkok dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti: (1) dampak keselamatan lingkungan laut yang dilihat dari terganggunya aktivitas nelayan untuk menangkap ikan pelagis di laut Tiongkok dan terganggunya strategi maritim Tiongkok; (2) dampak pembangunan ekonomi laut Tiongkok yang dilihat dari terganggunya pariwisata pesisir Tiongkok dan terganggunya industri perikanan untuk pangan; (3) dampak kekhawatiran tinggi dari Masyarakat Tiongkok sehingga menghindari makanan laut dan *panic*

*buying* produk garam (Li, 2023). Dampak-dampak yang terjadi tersebut membuat Pemerintah Tiongkok harus berusaha membuat solusi agar situasi negara kembali stabil. Hal ini yang membuat Tiongkok mengeluarkan berbagai respon yang dilakukan oleh berbagai pihak internal yang berkepentingan di Tiongkok, baik itu pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat dengan tujuan yang sama-sama ingin menghentikan tindakan Jepang. Negara berperan untuk melindungi Masyarakat dan lingkungan yang menunjang kesejahteraan hidup negaranya (Bueger, 2015).

Kasus ini penting untuk dibahas karena kasus pembuangan air limbah nuklir secara bertahap dan diumumkan secara terbuka di publik baru pertama kali dilakukan sepanjang Sejarah sehingga belum ada aturan hukum internasional yang mengatur tindakan Jepang ini. Selain itu, kasus ini beresiko menjadi konflik yang berkepanjangan karena melibatkan wilayah Samudra Pasifik yang diakses oleh banyak negara termasuk Tiongkok. Selain itu, tumpukan radiasi berbahaya zat tritium dalam jangka panjang dapat mengancam keselamatan manusia dan lingkungan laut di masa depan. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui respon Tiongkok terhadap ancaman keamanan maritim sebagai dampak dari pembuangan air limbah nuklir Jepang ke Samudra Pasifik pada tahun 2023.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) literatur jurnal penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi penulisan ini. Berikut uraian penjelasan dari referensi tersebut, yaitu:

Pertama, Penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Christian Bueger yang berjudul "*What is Maritime Security?*" yang berasal dari Jurnal *Marine Policy*, Volume 53, Tahun 2015, Halaman 159-164 (Bueger, 2015). Signifikansi jurnal ini membahas tentang pandangan Christian Bueger yang menjelaskan 3 (tiga) kerangka kerja dalam konsep keamanan maritim, yaitu: matrik keamanan maritim, kerangka sekuritisasi, dan teori praktik keamanan. Persamaan jurnal terdahulu terletak pada sama-sama menggunakan konsep keamanan maritim dengan bantuan matrik. Sedangkan, perbedaan jurnal terdahulu terletak pada penjelasan umum tentang 4 konsep keamanan dalam matrik keamanan maritim. Hal ini membuat Penulis dapat mengambil celah kebaharuan tulisan dengan mengaitkan pencemaran laut lintas batas dari kasus tindakan Jepang menggunakan konsep keamanan maritim yang fokus pada *Marine Safety* dan *Blue Economy*.

Kedua, Penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Aprilia Mawaddah, Maria Maya Lestari, dan Ledy Diana yang berjudul "Analisis Hukum terhadap Rencana Pembuangan Limbah Nuklir ke Laut Pasca Terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami di Jepang" yang berasal dari Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 92-103 (Mawaddah et al., 2023). Signifikansi jurnal ini membahas tentang sejarah kecelakaan nuklir Jepang (2011) yang menyimpan air limbah nuklir. Persamaan jurnal terdahulu terletak pada sama-sama menganggap Jepang melanggar Konvensi Keselamatan Nuklir. Sedangkan, perbedaan jurnal terdahulu terletak pada penjelasan yang hanya fokus mengkaji aturan hukum yang dilanggar saja secara umum. Hal ini membuat Penulis dapat mengambil celah kebaharuan tulisan dengan menggunakan perspektif Tiongkok dengan bantuan konsep marine safety untuk melihat kasus kecelakaan nuklir yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut Tiongkok.

Ketiga, Penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Hajriyanti Nuraini yang berjudul "Analisis Mengenai Keputusan Pemerintah Jepang dalam Pembuangan Air Radioaktif *Fukushima* terhadap Hukum Lingkungan Internasional" yang berasal dari Jurnal *LITRA: Jurnal Hukum*

*Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2022, Halaman 265-276 (Nuraini, 2022). Signifikansi jurnal ini membahas tentang pandangan Hukum Lingkungan Internasional (Konvensi UNCLOS 1982 pada pasal 192 dan 194 serta Konvensi London) terhadap keputusan pembuangan air limbah nuklir Jepang ke laut. Persamaan jurnal terdahulu terletak pada sama-sama membahas belum ada sanksi regulasi internasional bagi Jepang. Sedangkan, perbedaan jurnal terdahulu terletak pada penjelasan tentang pembuangan tritium ke laut harus memperhatikan kewajiban, sanksi boleh dilakukan jika sudah terbukti terjadi. Hal ini membuat Penulis dapat mengambil celah kebaruan tulisan dengan menjelaskan bahwa Tiongkok menganggap tindakan Jepang sebagai ancaman sehingga akan melakukan sanksi bilateral. Hal ini karena walaupun dibuang dibawah standar, tetapi dilakukan secara bertahap yang tidak diketahui batas waktu.

Keempat, Penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Meng Li yang berjudul “*Fishery Legislative Reform Towards Japan’s Fukushima Nuclear Wastewater Discharge into The Sea—A Chinese Perspective*” yang berasal dari jurnal *Frontiers in Marine Science*, Volume 10, Tahun 2023, Halaman 1-11 (Li, 2023). Signifikansi jurnal ini membahas tentang Jepang mengganggu tatanan UU Perikanan Pelagis Tiongkok di laut. Persamaan jurnal terdahulu terletak pada sama-sama membahas dampak bagi keamanan laut Tiongkok. Sedangkan, perbedaan jurnal terdahulu terletak pada lebih berfokus penjelasan tentang dampak reformasi Undang-Undang Perikanan Tiongkok akibat Tindakan Jepang. Hal ini membuat Penulis dapat mengambil celah kebaruan tulisan dengan menganalisis dampak menggunakan konsep marine safety dan blue economy serta pedoman kebijakan yang dilanggar Jepang. Selain itu, dampak yang dirasakan Tiongkok juga lebih terarah, seperti: dampak bagi keselamatan laut, pembangunan ekonomi biru, dan kekhawatiran masyarakat.

Kelima, Penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Muhammad Imansyah yang berjudul “Reaksi Norwegia setelah Munculnya *Iceberg Project* Rusia di Wilayah Arktik pada Tahun 2015” yang berasal dari *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 8, Nomor 4, Tahun 2020 (Imansyah, 2020). Signifikansi jurnal ini membahas tentang tindakan dan Kebijakan perlindungan Norwegia terhadap pelaksanaan iceberg Rusia di Laut Arktik. Persamaan jurnal terdahulu terletak pada sama-sama membahas pembuangan ke laut, ancaman maritim, dan respon negara. Sedangkan, perbedaan jurnal terdahulu terletak pada lebih berfokus penjelasan tentang Lokasi, actor (negara), respon (Kebijakan *Norway’s Arctic Strategy between Geopolitics and Social Development* dan Respon Tindakan pelatihan militer dengan NATO), jenis kecelakaan, Konsep (*Dilema Security*). Hal ini membuat Penulis dapat mengambil celah kebaruan tulisan dengan menggunakan konsep keamanan maritim untuk menganalisis ancaman yang terjadi dan menggunakan konsep kebijakan luar negeri untuk melihat respon Tiongkok melalui aktor negara (pemerintah) dan respon Tiongkok melalui aktor non-negara (perusahaan media, organisasi internasional, dan kelompok masyarakat), yang dimana responnya dapat berbentuk kebijakan, strategi, sikap, gagasan, aksi (tindakan), dan lain sebagainya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (*natural setting*) yang menjelaskan bahwa posisi peneliti ditempatkan sebagai instrumen penelitian (Sugiyono, 2019). Instrumen penelitian kualitatif adalah orang atau manusia yaitu peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus mempunyai bekal wawasan

yang luas dan pemahaman teori yang baik agar dapat merumuskan pertanyaan penelitian, menganalisis fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti, serta menjawab dan menyusun konstruksi sosial yang diteliti agar menjadi penelitian yang lebih jelas, ilmiah dan bermakna. Selain itu, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami lebih jauh objek yang diteliti dengan memberikan penjelasan dalam bentuk narasi dan kata-kata atau dengan kata lain tidak berfokus pada data berupa angka-angka (Sugiyono, 2019).

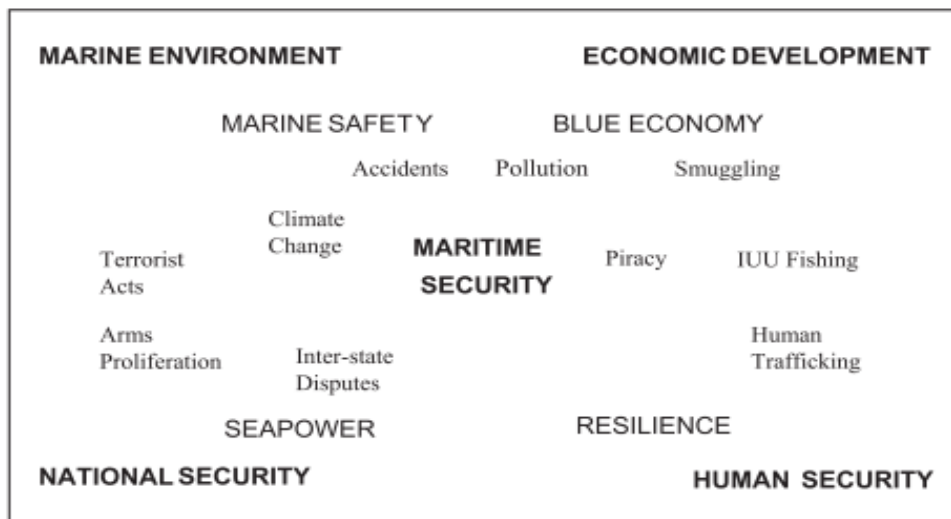
Kemudian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara naratif terkait fenomena-fenomena yang ada dalam objek penelitian agar terlihat jelas secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data fakta yang diteliti (Sugiyono, 2019)

## KERANGKA PEMIKIRAN

### Konsep Keamanan Maritim

Penelitian ini menggunakan konsep keamanan maritim menurut Christian Bueger (2015) yang menyatakan bahwa definisi keamanan maritim adalah suatu keadaan ketika lingkungan laut sudah aman atau terbebas dari berbagai bentuk ancaman dan Tindakan ilegal di wilayah laut. Selanjutnya, Christian Bueger menyederhanakan konsep ini melalui matrik keamanan maritim yang memuat 4 (empat) konsep keamanan untuk mengklasifikasikan berbagai bentuk ancaman keamanan maritim yang ada (Bueger, 2015).

Gambar 1. *Maritime security matrix*.



Sumber: Di dalam Jurnal *Marine Policy* yang berjudul *What is Maritime Security?* yang ditulis oleh Christian Bueger.

#### a. Konsep Keselamatan Laut (*Marine Safety*)

Konsep keselamatan laut dulunya digunakan membahas kecelakaan kapal Titanic tahun 1912 sehingga hanya berfokus pada peristiwa kecelakaan (*accident*) di laut yang digunakan untuk menganalisis keselamatan kapal, keselamatan instalansi maritim, perlindungan terhadap para profesional maritim, serta membahas perlindungan, pencarian dan penyelamatan awak kapal dan penumpang (Bueger, 2015). Namun,

konsep ini mulai berkembang setelah terjadinya tumpahan minyak di laut ketika Perang Teluk tahun 1991 sehingga mulai membahas tentang pencemaran lingkungan laut dan perubahan iklim di laut (Bueger, 2015).

b. Konsep Ekonomi Biru (*Blue Economy*)

Konsep ekonomi biru ini digunakan untuk menghubungkan berbagai sumber pembangunan ekonomi lautan dan pembangunan ekonomi nasional, seperti: sumber industri perikanan untuk pangan, sumber daya ekosistem laut, sumber daya lepas pantai, energi fosil, pelayaran dan perdagangan, pertambangan dasar laut, serta potensi pariwisata pesisir (Bueger, 2015). Konsep ini digunakan menjelaskan bahwa kondisi lingkungan laut dianggap aman ketika terbebas dari adanya ancaman tindakan penyelundupan barang ilegal, *IUU fishing* dan adanya kriminalitas pembajakan kapal di laut sebagai beberapa penghambat dilaksanakannya dengan lancar pembangunan ekonomi dari suatu negara maritim (Bueger, 2015). Berdasarkan penjelasan yang ada tersebut dapat diketahui keterkaitan antara konsep keamanan maritim dengan konsep ekonomi biru adalah adanya keseimbangan antara pemanfaatan laut untuk ekonomi dan pelestarian lingkungan laut untuk menciptakan keamanan secara berkelanjutan.

c. Konsep Kekuatan laut (*Seapower*)

Konsep kekuatan laut ini digunakan untuk menjelaskan bentuk penegakan kedaulatan di laut yang dilakukan oleh suatu negara. Berdasarkan matrik keamanan maritim tersebut, maka kondisi aman dari konsep ini dapat diindikasikan ketika terbebas dari konflik yang terjadi antara negara yang satu dengan negara yang lain, baik berkaitan dengan isu pengklaiman wilayah teritorial, isu perebutan perbatasan laut, adanya proliferasi senjata di kawasan laut, serta indikasi keberadaan aksi tindakan terorisme yang terjadi di laut (Bueger, 2015).

d. Keamanan Manusia (*Human Security*)

Konsep ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kondisi aman diindikasikan ketika suatu negara terbebas dari beberapa bentuk ancaman terhadap keamanan manusia di laut, salah satunya seperti tindakan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang banyak dilakukan melalui jalur di laut. Perdagangan manusia yang banyak terjadi melalui jalur laut membuat ketahanan maritim suatu negara menjadi terganggu karena dianggap tidak mampu melindungi keamanan masyarakat di dalam negeri sendiri (berfokus pada masalah yang dihadapi oleh individu yang menempati suatu negara). Hal ini dikarenakan pemahaman tentang masyarakat (individu) yang aman dan sejahtera dapat menjalankan dan mewujudkan negara yang aman dan sejahtera juga (Bueger, 2015).

Dalam penelitian ini, konsep keamanan maritim ini digunakan untuk membantu Penulis menemukan penjelasan tentang bentuk-bentuk ancaman maritim yang dihadapi oleh Tiongkok yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 4 (konsep keamanan dalam matrik) sehingga diketahui bahwa tindakan pembuangan air limbah nuklir Jepang telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan pencemaran lintas batas dan melakukan kejahatan pelestarian lingkungan laut sehingga kasus ini masuk dalam konsep keselamatan laut (*marine safety*) dan konsep ekonomi biru (*blue economy*). Setelah diketahui konsep yang dilanggar oleh Jepang, maka Tiongkok dapat memberikan sanksi secara bilateral melalui kebijakan yang sudah berimplikasi secara langsung dari konsep-konsep tersebut.

## Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan dalam suatu negara dengan tujuan untuk menghadapi negara dan aktor politik internasional lainnya. Kebijakan luar negeri adalah bentuk aktualisasi dari politik luar negeri pada suatu negara. Kebijakan luar negeri juga dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan yang berisikan tata cara suatu negara untuk berinteraksi dan memberikan respon dengan aktor eksternal lainnya, baik interaksi dengan aktor negara maupun interaksi dengan aktor non-negara.

Menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri adalah bentuk upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Delanova, 2018). Menurut James N. Rosenau, input keputusan (masuknya keputusan) yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan luar negeri berasal dari empat sumber, yaitu: sistemik (berasal dari lingkungan eksternal), masyarakat (berasal dari lingkungan internal), pemerintah (berasal dari lingkungan internal), dan idiosinkratik (berasal dari lingkungan internal).

Selanjutnya, terdapat pendapat tentang konsep kebijakan luar negeri menurut K.J. Holsti, yang dimana kebijakan luar negeri adalah keseluruhan tindakan dan aktivitas negara yang diambil dalam rangka merespon kondisi lingkungan eksternalnya untuk memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut (Delanova, 2018). Kebijakan luar negeri ini melibatkan strategi, cita-cita, metode, tindakan, kesepakatan, panduan, metode, arahan, pemahaman, dan kesepakatan dari pemerintahan suatu negara untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain, organisasi internasional, maupun dengan aktor-aktor nonpemerintah lainnya. Kebijakan luar negeri ditujukan untuk mempengaruhi negara lain maupun aktor internasional. Selanjutnya, K.J. Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri menjadi arahan Negara Tiongkok untuk mengeluarkan elemen respon atau tanggapan yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti: aksi (reaksi) militer, sikap diplomatik tertentu, ide atau gagasan, doktrin (ideologi), strategi non-blok, tindakan persuasif dan kooperatif, dan lain sebagainya dengan semua elemen respon ini berkonteks nasional yang orientasinya ke luar negeri (Delanova, 2018).

Dalam penelitian ini, konsep kebijakan luar negeri digunakan untuk membantu Penulis menemukan penjelasan tentang respon Tiongkok terhadap ancaman keamanan maritim yang timbul akibat ulah Jepang yang membuang air limbah nuklir ke laut. Kebijakan luar negeri ini memberikan Penulis arahan untuk mengklasifikasikan respon yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional agar respon dapat lebih terarah, yaitu: (1) respon Negara Tiongkok dengan melalui Aktor Negara seperti Negara Jepang (negara representatif pemerintah) serta (2) respon Negara Tiongkok dengan melalui Aktor Non-Negara (organisasi internasional seperti IAEA, perusahaan media internasional seperti kantor berita Xinhua, serta kelompok masyarakat Tiongkok seperti kelompok lingkungan hidup/kelompok nelayan/kelompok pebisnis/masyarakat Tiongkok secara luas. Hal ini dikarenakan aktor-aktor internal non-pemerintah dapat memberikan sumbangan keputusan untuk dipertimbangkan pada hasil akhir keputusan kebijakan luar negeri yang akan digunakan oleh Negara Tiongkok. Selain itu, konsep kebijakan luar negeri ini juga digunakan untuk menjelaskan bahwa terdapat berbagai bentuk tindakan respon yang dapat dilakukan oleh Tiongkok, seperti: strategi, kebijakan, aksi, sikap, tindakan, dan lain sebagainya yang bertujuan menghentikan ancaman maritim dari Jepang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Tindakan Jepang bagi Keamanan Maritim Tiongkok

Setelah Menteri Lingkungan Hidup Jepang, yaitu Yoshihide Suga mengumumkan bahwa Jepang mulai membuang limbah nuklir ke laut, maka Tiongkok mulai menyampaikan beberapa dampak yang dialami oleh negaranya sehingga Tiongkok dapat memberikan sanksi secara bilateral, walaupun masih belum ada hukum internasional yang memberikan sanksi kepada Jepang. Selanjutnya, dengan menggunakan konsep keamanan maritim, maka dapat diketahui beberapa dampak dan penjabaran pedoman kebijakan yang digunakan oleh Tiongkok sebagai dasar untuk bertindak mengeluarkan respon atas tindakan pembuangan air limbah nuklir Jepang ke laut, yaitu:

#### a. Dampak Keselamatan Laut Tiongkok (*Marine Safety*)

Dampak ini berkaitan dengan kecelakaan nuklir yang menghasilkan zat radioaktif berbahaya yang dibuang ke laut lalu menjadi pencemaran berbahaya bagi manusia dan ekosistem kehidupan jangka Panjang. Berikut beberapa dampak khususnya, yaitu:

Pertama, Dampak Bahaya Radiasi Zat Radioaktif Tritium dan Selain Tritium. Kandungan zat tritium itu masih tetap ada di laut karena membutuhkan waktu sekitar 12,33 tahun untuk dapat terurai secara alami. Hal ini menjelaskan bahwa ketika Jepang membuang zat tritium tersebut ke Samudra Pasifik, maka kandungannya masih ada di laut yang memungkinkan terjadinya tumpukan radiasi jangka panjang. Tumpukan tritium dalam tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit kanker, sedangkan tritium bagi makhluk laut adalah menyebabkan mutasi gen yang dapat merusak tatanan ekosistem yang sudah ada (Li, 2023).

Kedua, Dampak terbawanya radiasi melalui arus Kuroshio akibat kedekatan geografis yang mengganggu strategi maritim Tiongkok dan area penangkapan ikan pelagis nelayan Tiongkok. Setelah dilakukannya pembuangan limbah nuklir oleh Jepang, maka terjadi beberapa perubahan pada penangkapan ikan Tiongkok, seperti: (1) tidak boleh menangkap ikan yang tercemar dan terkontaminasi zat berbahaya, (2) tidak boleh menangkap ikan di beberapa titik yang terlalu dekat dengan lokasi pembuangan air limbah laut tersebut, (3) melakukan pengecekan lebih ketat terhadap kapal penangkap ikan untuk memastikan ikan yang ditangkap aman dari kontaminasi zat radioaktif, serta (4) perlu menambahkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan. Hal ini tentunya mengganggu Tiongkok untuk mewujudkan strategi maritimnya (Li, 2023).

Tiongkok menganggap Jepang melanggar Konvensi Keselamatan Nuklir Pasal 16 ayat 1 (syarat keamanan Pembangunan PLTN) dan Pasal 16 ayat 2 (Jepang tidak melibatkan keputusan masyarakat dan negara tetangga untuk kasus pembuangan ke laut) (Mawaddah et al., 2023). Oleh karena itu, melalui kebijakan *marine safety (marine environment)* yang berkaitan dengan pengaturan keselamatan laut Tiongkok sebagai pencegahan dan perlindungan Tiongkok dari bahaya kontaminasi zat radioaktif nuklir berbahaya. Kebijakan ini diambil dari Buku Putih Tahun 2020 dengan melaksanakan beberapa hal, seperti: (1) pemeriksaan, pengawasan, dan ekspor impor sertifikat untuk berbagai produk ikan yang masuk dan keluar Tiongkok; (2) memastikan ekspor hasil tangkapan ikan legal, patuh, dan dapat dilacak (Li, 2023). Pemantauan ketat terhadap produk Jepang ini dilakukan akibat dari Jepang yang tidak mampu mengatasi kecelakaan nuklir Fukushima tersebut membuat krisis kepercayaan masyarakat dunia terhadap Jepang (Rahman, 2023).



### **b. Dampak Pembangunan Ekonomi Laut Tiongkok (*Blue Economy*)**

Tiongkok memiliki kebijakan untuk mengembangkan ekonomi biru melalui berbagai aspek, seperti: sumber industri perikanan untuk pangan, sumber daya ekosistem laut, sumber daya lepas pantai, energi fosil, pelayaran dan perdagangan, pertambangan dasar laut, serta potensi pariwisata pesisir (Bueger, 2015). Selanjutnya, terdapat beberapa contoh kebijakan ekonomi biru yang menjadi proyek strategis Tiongkok, seperti: (1) Inovasi kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi maritim dengan negara lain (bekerja sama dengan Jepang sejak tahun 1980); (2) Pengembangan Zona Ekonomi Biru Semenanjung Shandong; (3) Pembangunan Lembah Silikon Biru; (4) Kerja sama regional antar taman laut dan pangkalan Delta Sungai Yangtze; (5) Meningkatkan pariwisata pesisir Tiongkok. Namun, setelah terjadi pembuangan air limbah nuklir ke laut oleh Jepang, maka terjadi beberapa dampak di sektor ini, yaitu: (Wenhai et al., 2019)

Pertama, dampak penurunan jumlah pengunjung, baik yang bertujuan untuk perjalanan bisnis maupun wisata pesisir dari Jepang menuju Tiongkok. Hal ini berpengaruh terhadap sumber pendapatan Tiongkok karena 79,9 juta lapangan pekerjaan berasal dari sektor ini. Keterkaitannya dengan kasus pembuangan limbah adalah hubungan Tiongkok dengan Jepang tidak harmonis, sedangkan Negara Jepang menempati urutan keempat sebagai negara pengunjung terbanyak ke Tiongkok.

Kedua, dampak terganggunya industri perikanan untuk pangan dan lapangan pekerjaan dari beberapa pihak. Dampak pada aspek konsumsi pangan ini dilihat dari masyarakat Tiongkok yang takut dengan radiasi nuklir sehingga memilih menghindari produk laut, padahal seperti yang diketahui bahwa seafood adalah makanan kegemaran bahkan menjadi makanan pokok dari Masyarakat Tiongkok. Selanjutnya, pada aspek pekerjaan juga ikut terganggu yang berasal dari nelayan, pedagang di ikan pasar, dan pebisnis restoran menjadi sepi pengunjung. Selain itu, panic buying produk garam dari dalam negeri bahkan impor besar-besaran dari Rusia semakin membuat Negara Tiongkok perlu menstabilkan situasi negaranya.

Oleh karena itu, Tiongkok menganggap Jepang melanggar kebijakan *blue economy* yang berkaitan dengan perjanjian ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang ditandatangani sejak tahun 1980 bersama Jepang. Berdasarkan perjanjian tersebut, dapat diketahui bahwa Jepang melakukan Tindakan sewenang-wenang sehingga Tiongkok dapat memberikan sanksi bagi Jepang, seperti: mengecek dengan ketat suatu produk, membatasi atau bahkan melarang impor produk perikanan Jepang.

### **c. Dampak terhadap Masyarakat Tiongkok**

Setelah Jepang membuang limbah nuklir ke laut, terjadi berbagai respon langsung bagi Masyarakat Tiongkok, seperti: Muncul kekhawatiran tinggi dalam mengonsumsi seafood, yang Dimana hal ini dibuktikan adanya penurunan konsumsi seafood sebesar 67,6% dari tahun sebelumnya yang mengimpor 84,4% ikan dari Jepang. Selain itu, berdasarkan data diketahui bahwa kelompok industri garam nasional mengumumkan bahwa terjadi panic buying produk garam karena mudah tersevarnya berita hoaks tentang garam beryodium dapat menangkal radiasi nuklir sehingga Masyarakat Tiongkok bahkan mengimpor dari Rusia untuk ditimbun stok produk (Berty, 2023).

## Respon Tiongkok terhadap Ancaman Keamanan Maritim dari Jepang

Berdasarkan konsep kebijakan luar negeri dari K. J. Holsti yang menjelaskan bahwa dalam pembuatan keputusan respon dapat dilakukan antara interaksi aktor negara dengan aktor negara juga seperti Negara Tiongkok dan Negara Jepang. Selanjutnya, James N. Rosenau menjelaskan bahwa dalam pembuatan keputusan respon dari Negara Tiongkok dapat bersumber dari beberapa pihak internal yang juga menyumbang hasil keputusannya (aktor pemerintah dan non-pemerintah yang berasal dari internal Negara Tiongkok) (Delanova, 2018).

### 1. Respon Tiongkok melalui Aktor Negara

Aktor negara dapat direpresentasikan dari sumber keputusan respon dari pihak pemerintah. Berikut beberapa respon yang dilakukan Negara Tiongkok dalam bentuk respon tindakan dan kebijakan yang bersumber dari keputusan internal pemerintah, yaitu:

#### a. Pemerintah Tiongkok memberlakukan Embargo Ekonomi melalui Kebijakan Pelarangan Impor Produk Perikanan dan Kosmetik Jepang

Embargo ekonomi ini dilakukan karena Jepang melanggar perjanjian ilmu pengetahuan dan teknologi maritim Bersama Jepang dalam kebijakan blue economy sehingga Tindakan ini menjadi sanksi bagi Jepang. Berdasarkan pengumuman dari Departemen Bea Cukai Tiongkok serta pengumuman administrasi umum Kepabean Nomor 103 Tahun 2023 yang dicantumkan dari laman resmi Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tiongkok, maka sejak 24 Agustus 2023 mulai diberhentikannya impor produk laut yang berasal dari Jepang. Secara rinci Tiongkok melarang impor produk dari sepuluh prefektur di Jepang, yaitu: Makanan laut yang hidup, beku, dikeringkan, didinginkan, atau diawetkan, makanan hewani, garam laut, rumput laut, serta produk olahan yang berasal dari Fukushima, Miyagi, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Nagano, dan Nigata. Kemudian, Wilayah Administratif Tiongkok juga ikut menerapkan kebijakan ini seperti: Hongkong, Makau, dan Taiwan (Tim CNN Indonesia, 2023).

#### b. Pemerintah Tiongkok melakukan Penelitian Kandungan Limbah Nuklir Jepang dan Pemantauan Ketat pada Penangkapan Ikan dari Laut Tiongkok

Menurut penelitian dari Komisi Energi Atom Taiwan yang bekerja sama dengan Pemerintah Tiongkok, ternyata terdapat unsur zat selain tritium dalam air limbah nuklir Jepang, seperti carbon-14, cobalt-60, strontium-90, iodine-129 dan caesium-137. Penelitian tersebut mendukung Tiongkok melalui kebijakan terkait *Marine Safety* mulai melakukan pemantauan legitimasi kapal penangkap ikan pelagis nelayan di Perairan milik Tiongkok sendiri dan mengecek ketat hasil ekspor-impor produk perikanan yang keluar masuk di Tiongkok sebagai bentuk waspada bagi dalam negeri sendiri. Kebijakan ini diambil dari Buku Putih Tahun 2020 dengan melaksanakan beberapa hal, seperti: (1) pemeriksaan, pengawasan, dan ekspor impor sertifikat untuk berbagai produk ikan yang masuk dan keluar Tiongkok; (2) memastikan ekspor hasil tangkapan ikan legal, patuh, dan dapat dilacak (Li, 2023). Pemantauan ketat terhadap produk Jepang ini dilakukan akibat dari Jepang yang tidak mampu mengatasi kecelakaan nuklir Fukushima tersebut membuat krisis kepercayaan masyarakat dunia terhadap Jepang (Rahman, 2023).

#### c. Pemerintah Tiongkok melakukan Tekanan Diplomatik terhadap Pemerintah Jepang

Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping telah memberi peringatan dan desakan secara langsung kepada Perdana Menteri Jepang yaitu Fumio Kishida pada saat sela-sela

pertemuan para pemimpin negara di KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, Amerika Serikat yang diadakan pada hari Jumat, 17 November 2023 (CNBC Indonesia, 2023). Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan bahwa pelepasan limbah radioaktif dari PLTN Fukushima mengganggu keamanan maritim Tiongkok, jika tindakan tersebut dihentikan maka Tiongkok juga akan menghentikan sanksi embargo ekonomi. Namun, Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Fumio Kishida menolak tawaran Tiongkok dengan bersikukuh menuntut bukti ilmiah bahaya kandungan limbah yang dibuang ke laut.

## 2. Respon Tiongkok melalui Aktor Non-Negara

Berdasarkan konsep kebijakan luar negeri dari K. J. Holsti juga menjelaskan bahwa dalam pembuatan keputusan respon dari negara dapat dilakukan antara interaksi aktor negara dengan aktor non-negara. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Tiongkok dapat memberikan respon juga melalui perantara organisasi internasional yang mengizinkan tindakan Jepang, seperti IAEA. Selanjutnya, konsep kebijakan luar negeri dari James N. Rosenau menjelaskan bahwa aktor negara dapat bersumber dari beberapa pihak internal lain yang juga menyumbang hasil keputusannya (non-pemerintah yang berasal dari internal Negara Tiongkok), seperti: perusahaan media dan kelompok masyarakat yang berada di Tiongkok. Berikut beberapa respon yang dilakukan Tiongkok melalui respon tindakan yang bersumber dari keputusan aktor non-pemerintah, yaitu: (Delanova, 2018)

### a. Respon Tiongkok melalui Tekanan Opini Publik dari Perusahaan Media Tiongkok

Penolakan yang terjadi disebarkan melalui Perusahaan Media Tiongkok yang bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok. Opini publik yang paling banyak disampaikan dalam berita negara adalah pernyataan para pejabat penting Tiongkok. Beberapa perusahaan media yang menjadi mesin propaganda milik Partai Komunis Tiongkok yang digunakan dalam merespon Jepang, seperti: Surat Kabar *People's Daily*, opini publik juga diperkuat lagi melalui Kantor Berita Xinhua, serta Kantor Berita CCTV (*China Central Television*) (Qi et al., 2022). Berdasarkan beberapa pernyataan tokoh penting yang disebarkan melalui perusahaan media negara ini, maka dapat memberikan pengaruh untuk Negara Tiongkok merumuskan respon yang dilakukan secara aktif untuk terlibat dalam pembuatan dan penyebaran opini publik untuk menggalang dukungan menekan Jepang menyudahi pembuangan air limbah nuklir tersebut (Qi et al., 2022). Pernyataan dari tokoh penting seperti para pejabat Pemerintah Tiongkok tersebut tentunya dapat tersebar karena ada perusahaan media yang mengelolanya sehingga opini publik yang berjalan dapat dilaksanakan dengan efektif oleh Tiongkok.

### b. Respon Tiongkok Meminta IAEA Merilis Data Ilmiah Pembuangan Limbah Nuklir Jepang dan Pembuatan Tim Pemantau IAEA

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok ke-32 yaitu Wang Wenbin melalui media Berita Beijing menyatakan belum ada aturan pemantauan internasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkena dampak dari Tindakan Jepang. Hal ini membuat Tiongkok telah menggugat pengawasan Sekretariat IAEA agar diikutsertakan dalam tim pemantauan internasional yang dibentuk IAEA pada tanggal 16-23 Oktober 2023 (Natalia, 2023).

Selain itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok ke-33 Tiongkok yaitu Mao Ning juga mendesak Direktur Jenderal IAEA yaitu Rafael Mariano untuk membentuk pengaturan pengawasan internasional dan laporan spesifik jangka panjang untuk setiap tahapan pembuangan Jepang. Menurut regulasi standar keamanan nuklir internasional yang disampaikan oleh *World Health Organization* (WHO) bahwa batas minimal jumlah kandungan tritium pada air sekitar 10.000 *becquerel* perliter, sedangkan jumlah zat tritium yang dibuang oleh Jepang sekitar 1.500 *becquerel* perliter sehingga dianggap masih aman serta dampak bagi manusia dan lingkungan dapat diabaikan (Ardhi, 2023). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tindakan Jepang dianggap tidak melanggar regulasi hukum internasional sehingga belum ada sanksi secara internasional yang dapat menghukum tindakan Jepang ini.

Namun, Hal ini masih menjadi perdebatan antara Tiongkok dan Jepang karena kasus ini terbilang baru atau belum pernah ada sepanjang sejarah dilakukan pembuangan zat berbahaya ke laut secara sedikit demi sedikit (di bawah standar keselamatan), tetapi Jepang melakukan pembuangan dalam beberapa tahapan yang tidak dapat diprediksi secara pasti waktu akhir dari aktivitas pembuangan air limbah nuklir ini ke laut. Sehingga belum dapat dipastikan dan dibuktikan keamanannya untuk jangka panjang bagi manusia dan lingkungan (Christiastuti, 2023). Hal ini dapat dilihat dari tindakan Jepang yang masih terus melakukan pembuangan air limbah dalam beberapa tahapan, yaitu: Tahap I (24 Agustus-11 September 2023), tahap II (5 Oktober-23 Oktober 2023), tahap III (2 November-20 November 2023), dan seterusnya hingga tidak diketahui kapan jumlah air limbah nuklir dalam penampungan Jepang akan habis (Sinaga, 2023). Pembuangan tahap pertama, kedua, dan ketiga dilakukan masing-masing sebanyak 7.800 ton air limbah atau setara dengan jumlah air yang memenuhi tiga kolam renang ukuran olimpiade dengan lama proses pembuangan selama 17 hari dalam satu tahapan pembuangan (Christiastuti, 2023).

### c. Respon Tiongkok melalui “Inisiatif Komunitas Nasib Bersama” dan Organisasi Internasional

Tiongkok ingin kasus Jepang ini dikaji bersama semua pihak yang berkepentingan atas Samudra Pasifik sehingga Tiongkok meminta Organisasi internasional (PBB, WHO, IAEA) untuk membuat regulasi, tim pemantau, serta pelaporan spesifik yang bersifat transparansi untuk diakses umum. Tiongkok juga mengajak negara-negara Lingkaran Pasifik (APEC) melalui “Komunitas Nasib Bersama” agar dapat membantu Pemerintah Jepang mencari alternatif penyelesaian lain selain membuang air limbahnya ke Samudra Pasifik sehingga lingkungan laut dapat aman dari potensi pencemaran lintas batas zat radioaktif limbah nuklir. Hal ini dikarenakan jika dibiarkan adanya satu negara seperti Jepang yang membuang limbah nuklir ke laut dengan status aman dibuat sendiri secara sepihak, maka akan membuat negara-negara yang lain bisa saja mengikuti langkah Jepang yang membuang air limbah nuklir secara terang-terangan tanpa rasa bersalah ke laut. Tentunya untuk menghindari hal seperti ini, maka Tiongkok berupaya untuk menentang dan menghentikan Jepang dengan meminta bantuan melalui perantara organisasi internasional yang memang berwenang dalam kasus ini. Tujuan dari agenda Tiongkok adalah tetap melindungi negaranya dari ancaman, tetapi tetap juga menjaga perdamaian dengan negara lain, termasuk Jepang (Qi et al., 2022).

#### d. Respon Tiongkok melalui Masyarakat Tiongkok

Berdasarkan konsep kebijakan luar negeri menurut James N. Rosenau, maka Kelompok Masyarakat Tiongkok masuk sebagai aktor internal (non-pemerintah) yang bisa mempengaruhi sumber keputusan Negara Tiongkok untuk membuat respon. Berikut bentuk respon tersebut: (Delanova, 2018)

Pertama, Mendukung Kebijakan Embargo Ekonomi Pemerintah. Konsulat Jepang di Tiongkok memberitahukan adanya aksi demo 100 Masyarakat Tiongkok. Selain itu, Masyarakat Tiongkok juga senantiasa mengikuti kebijakan pemerintah dengan menghindari 10 prefektur Jepang yang dibuktikan dari data penurunan ekonomi Jepang sebesar 42% di sektor industri perikanan (Adhra, 2023).

Kedua, Menyebarkan Opini Publik melalui Media Sosial. Masyarakat Tiongkok menggunakan platform Weibo menyebarkan mosi tidak percaya pada kata “aman” dari Tindakan Jepang. Pengaruh media sosial sangat besar karena dapat menjadi bullying keras bagi Jepang. Salah satu postingan penggunaan Weibo Provinsi Shanxi menulis cuitan “Bumi bisa hidup tanpa Jepang, tapi bumi tidak bisa hidup tanpa makanan laut” (Tim CNN Indonesia, 2023).

Ketiga, Aksi Kritik Melalui Teror Telepon. Teror ditargetkan pada Kantor Kedutaan dan Konsulat Jepang melalui via telepon sehingga mengganggu pekerjaan Jepang karena sulit membedakan telepon penting dengan telepon iseng. Masyarakat Jepang juga mendapatkan teror telepon dari digit nomor pengguna Tiongkok (Adhra, 2023).

Keempat, Aksi Pelemparan Gedung sebagai Sentimen Anti-Jepang. Sentiment anti-Jepang semakin meningkat karena Tiongkok menganggap bahwa Jepang telah berhutang besar atas penderitaan kolonialisme di masa lalu dan sekarang Jepang ingin menciptakan penderitaan baru bagi Tiongkok di masa depan. Puncak dari sentiment anti-Jepang ini terjadi Ketika Masyarakat Tiongkok melakukan aksi pelemparan pada Gedung kedutaan besar Jepang yang berada di Tiongkok serta melakukan pelemparan pada Gedung-gedung Jepang lainnya, seperti: sekolah, kantor dan perusahaan dengan batu dan telur agar Jepang menghentikan Tindakan sepihaknya (Adhra, 2023).

## KESIMPULAN

Kasus tindakan pembuangan air limbah nuklir Jepang dianggap telah mengancam keamanan maritim Tiongkok yang diamati menggunakan bantuan konsep keamanan maritim dari Christian Bueger. Ancaman pencemaran laut dari kasus ini tidak dapat terhindarkan karena menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan oleh Negara Tiongkok, baik itu dampak keselamatan lingkungan laut, dampak pembangunan ekonomi laut, dan dampak terhadap Masyarakat Tiongkok. Dampak-dampak yang telah terjadi diperkuat dengan adanya beberapa kebijakan bilateral (kebijakan *marine safety* dan kebijakan *blue economy*) serta regulasi konvensi internasional yang pernah ditandatangani Jepang sehingga Tiongkok memiliki pedoman atau panduan dasar untuk memberikan respon berupa sanksi secara bilateral kepada Jepang.

Selanjutnya, K.J. Holsti dan James N. Rosenau melalui konsep kebijakan luar negeri menjelaskan bahwa respon yang dapat diberikan oleh Tiongkok tidak terbatas bagi keputusan respon dari aktor negara saja, melainkan dapat dibantu oleh aktor non-negara (organisasi internasional). Selain itu, Keputusan aktor negara juga berasal dari aktor internal Tiongkok, seperti: pemerintah, kelompok masyarakat, perusahaan media, dan aktor internal lainnya.

Respon aktor Negara Tiongkok direpresentasikan dengan respon Pemerintah Tiongkok. Selanjutnya, dapat dilakukan berbagai bentuk respon, seperti:

Pertama, respon Tiongkok melalui aktor Negara (Pemerintah Tiongkok), yaitu: (1) tekanan embargo ekonomi melalui kebijakan pelarangan impor produk perikanan dan kosmetik Jepang; (2) tekanan penelitian Tiongkok dan pemantauan ketat pada penangkapan ikan dari laut Tiongkok; dan (3) tekanan diplomatik.

Kedua, respon Tiongkok melalui aktor non-negara, yaitu: (1) tekanan opini publik negara melalui perusahaan media berita Tiongkok; (2) permintaan Tiongkok kepada IAEA untuk memberikan data ilmiah dari limbah nuklir Jepang; (3) tekanan melalui “Inisiatif Komunitas Nasib Bersama” dan organisasi internasional; dan (4) respon Masyarakat Tiongkok yang menjadi salah satu sumber internal keputusan Negara, seperti: (a) mendukung kebijakan embargo ekonomi pemerintah tentang pelarangan impor produk perikanan Jepang dan pembatasan beberapa produk kosmetik Jepang; (b) menyebarkan opini publik melalui media sosial agar masyarakat internasional mendukung Tiongkok; serta (c) melakukan aksi kritik melalui teror telepon; dan (d) melakukan sentimen anti-Jepang dengan melakukan pelemparan sejumlah bangunan milik Jepang di Tiongkok.

## REFERENSI

- Adhra, N. (2023). Relasi Bilateral Jepang-Cina Pasca Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima. *Foreign Policy Community of Indonesia Chapter UGM*. <https://fpciugm.medium.com/relasi-bilateral-jepang-cina-pasca-pembuangan-limbah-nuklir-fukushima-35d1939fecfe>
- Ardhi, S. (2023, September). Ribut Soal Jepang Buang Limbah Nuklir, Ini Tanggapan Ahli Teknik Nuklir UGM. *Website UGM*. <https://ugm.ac.id/id/berita/ribut-soal-jepang-buang-limbah-nuklir-ini-tanggapan-ahli-teknik-nuklir-ugm/>
- Arif, W., & Yanto, A. (2022). Konsep Makna Keamanan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*, 10(3), 277–234. <https://pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/125>
- Barak, H. (2023). Fukushima: Alasan Jepang Buang Limbah Air Nuklir Radioaktif ke Laut dan Apakah Itu Aman? *Liputan 6.Com*. <https://www.liputan6.com/global/read/5380774/fukushima-alasan-jepang-buang-limbah-air-nuklir-radioaktif-ke-laut-dan-apa-itu-aman>
- Berty, T. T. S. (2023). Impor Makanan Laut China dari Jepang Turun 67,6 Persen Usai Kebijakan Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima. *Liputan 6.Com*. <https://www.liputan6.com/global/read/5402681/impor-makanan-laut-china-dari-jepang-turun-676-persen-usai-kebijakan-pembuangan-limbah-nuklir-fukushima>
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Christiastuti, N. (2023). Jepang Mulai Persiapan Akhir untuk Buang Limbah PLTN Fukushima ke Laut. *Detiknews.Com*. <https://news.detik.com/internasional/d-6891598/jepang-mulai-persiapan-akhir-untuk-buang-limbah-pltn-fukushima-ke-laut>
- CNBC Indonesia. (2023, November). Xi Jinping Beri Peringatan ke Jepang, Ada Apa? *CNBC Indonesia.Com*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231117183223-4-489996/xi-jinping-beri-peringatan-ke-jepang-ada-apa>
- Delanova, M. O. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia pada Masa Pemerintahan Presiden Joko

- Widodo melalui Penguatan Diplomasasi Ekonomi. *Jurnal Dinamika Global*, 2(02), 154–172. <https://doi.org/10.36859/jdg.v2i02.40>
- Imansyah, M. (2020). Reaksi Norwegia Setelah Munculnya Iceberg Project Rusia di Wilayah Arktik pada Tahun 2015. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(4), 728–739. <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2021/01/6.-1302045202-Muhammad-Imansyah-D.pdf>
- Li, M. (2023). Fishery legislative reform towards Japan's Fukushima nuclear wastewater discharge into the sea—A Chinese perspective. *Frontiers in Marine Science*, 10, 1–11. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1135125>
- Mawaddah, A., Lestari, M. M., & Diana, L. (2023). Analisis Hukum Terhadap Rencana Pembuangan Limbah Nuklir ke Laut Pasca Terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami di Jepang. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 92–103. <http://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/491>
- Natalia, D. L. (2023). China Ragukan Rencana IAEA Ambil Sampel Air Dekat Reaktor Fukushima. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/3769503/china-ragukan-rencana-iaea-ambil-sampel-air-dekat-reaktor-fukushima>
- Nuraini, H. (2022). Analisis Mengenai Keputusan Pemerintah Jepang dalam Pembuangan Air Radioaktif Fukushima terhadap Hukum Lingkungan Internasional. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang Dan Agraria*, 1(2), 265–276. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.775>
- Qi, Y., You, K., & Guo, S. (2022). The Battle for Public Opinion of “Japan’s Nuclear Wastewater Sea Discharge.” *Open Journal of Political Science*, 12(3), 363–372. <https://doi.org/10.4236/ojps.2022.123021>
- Rahman, M. R. (2023). Jepang Undang China Bergabung dalam Kelompok Pemeriksa Limbah Nuklir. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/3702540/jepang-undang-china-bergabung-dalam-kelompok-pemeriksa-limbah-nuklir>
- Sinaga, Y. A. (2023, November). Jepang Mulai Pembuangan Ketiga Air Fukushima ke Laut Meski Ditentang. *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/3806037/jepang-mulai-pembuangan-ketiga-air-fukushima-ke-laut-meski-ditentang>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). Alfabeta. <https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpkk/>
- Tim CNN Indonesia. (2023). China Larang Impor Seafood Jepang Imbas Buang Limbah Nuklir Fukushima. *CNN Indonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230824140434-92-989987/china-larang-impor-seafood-jepang-imbasi-buang-limbah-nuklir-fukushima>
- Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., Reitz, A., Neves, A. A. S., O'Rourke, E., Mannarini, G., Pearلمان, J., Tinker, J., Horsburgh, K. J., Lehodey, P., ... Yufeng, Y. (2019). Successful Blue Economy Examples With an Emphasis on International Perspectives. *Frontiers in Marine Science*, 6, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00261>